

TESIS

GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

JALAN LINGKAR LUBUK KILANGAN – BUNGUS TELUK KABUNG

KOTA PADANG

Oleh

TOMI FIRDAUS, SH

NIM.: 1220123067



Komisi Pembimbing :

- 1. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

JALAN LINGKAR LUBUK KILANGAN – BUNGUS TELUK KABUNG

KOTA PADANG

(TOMI FIRDAUS, S.H., 1220123067, Magister Kenotariatan FHUA, 144 hlm, 2017)

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) 2012 mulai tahun 2012 yang hingga saat ini belum selesai karena terkendala pemberian ganti kerugian atas lahan dan tanaman. Adapun permasalahan yang akan dibahas dari penelitian ini adalah bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bagaimana penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang, dan bagaimana penyelesaian kasus yang timbul antara para pihak dalam penentuan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan mengumpulkan data primer yaitu penelitian menitikberatkan pada penelitian yang dilakukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun berbenturan dengan kebiasaan dalam menjalankan program TMMD selama ini dimana tidak ada ganti rugi dalam pembebasan tanah, lahan dan tanaman sementara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib memberikan ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Tanah. Begitupun halnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 menyatakan wajib memberikan ganti rugi bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman.

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan

**CHANGE LOSSES IN LAND PROCUREMENT FOR THE DEVELOPMENT OF
LINGKAR POWDER MILLIONS - BUNGUS GUNUNG KABUNG PADANG CITY**

(TOMI FIRDAUS, S.H., 1220123067, Master of Notary of FHUA, 129 hlm, 2017)

ABSTRACT

Procurement of land for the construction of the ring road Lubuk Kilangan - Bungus Teluk Kabung program of the Army Manunggal Entrance Village (TMMD) 2012 starting in 2012 which until now has not been completed due to constrained compensation of land and plants. The problems that will be discussed from this research is how the land procurement process for the construction of the ring road Lubuk Kilangan - Bungus Teluk Kabung Kota Padang, how the determination of the form and amount of compensation in the procurement of land for the construction of the ring road Lubuk Kilangan - Bungus Teluk Kabung Padang City, and How the settlement of cases arising between the parties in the determination of compensation in the procurement of land for the construction of the ring road Lubuk Kilangan - Bungus Teluk Kabung Padang City. This research is a sociological or empirical legal research by collecting primary data that is research focused on research conducted in the field. The results of the research indicate that the land acquisition process has been in accordance with the prevailing provisions but has been clashing with the habits in running the TMMD program so far there is no compensation in land acquisition, land and temporary crops in land acquisition for public interest referring to Presidential Regulation Number 36 Year 2005 as amended by Presidential Regulation No. 65/2006 and Regulation of Head of BPN No. 3/2007 concerning public procurement of land for compulsory land, building and plant compensation. Even in Law No. 2 of 2012 is a new legislation that specifically regulates the Land Procurement. Likewise Presidential Regulation No. 71 of 2012 and Regulation of the Head of National Land Agency Number 5 of 2012 states obliged to provide compensation fields per plot of land covering land, space above ground and underground, buildings and plants.

Keywords: Replace Losses, Land Procurement, Road Construction